



LAPORAN KINERJA



DINAS SOSIAL

KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan pertanggungjawaban institusi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini disampaikan dengan harapan adanya saran maupun tanggapan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini, dan akan kami pertimbangkan untuk penyempurnaannya.

Pelaihari, Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut



EKO TRIANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 19670601 199401 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bangsa Indonesia pada saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis dan dinamis yang mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi seimbang antara Pemerintah, Swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip dasar antara lain adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari good governance dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait hal ini akan memudahkan Institusi Pemerintah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dinas Sosial merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas utama dalam bidang kesejahteraan sosial, yang mencakup pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial berperan penting dalam menanggulangi kemiskinan, memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan yang semakin kompleks, Dinas Sosial menghadapi berbagai isu sosial yang memerlukan perhatian khusus. Masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, serta kebutuhan akan layanan sosial yang berkualitas menjadi fokus utama.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah



ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja yang selanjutnya disebut LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang pada pelaksanaannya telah dilengkapi dengan penandatanganan perjanjian kinerja dari eselon II hingga Staf.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut adalah untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya maupun kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai yang disampaikan secara melembaga, untuk dapat membantu penyusunan system pengukuran dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan.

C. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Sosial di Kabupaten Tanah Laut, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut memiliki kewenangan yang bersumber dari :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan



mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Intensitas Beban Kerja Urusan Pemerintahan



BAB I

PENDAHULUAN

Bidang Sosial daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1589);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);

D. Cascading Kinerja

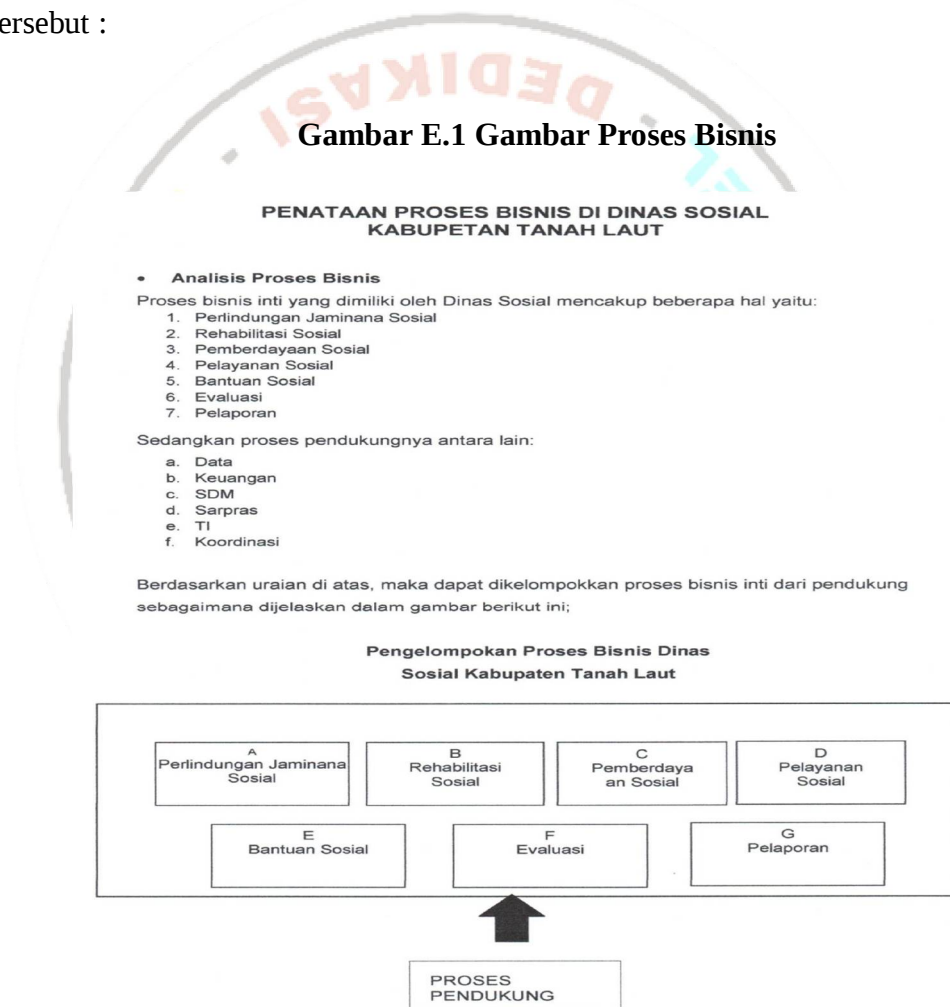
Selaras dengan paradig organisasi berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, setiap organisasi perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan maka dinas sosial membuat Cascading kinerja yaitu :

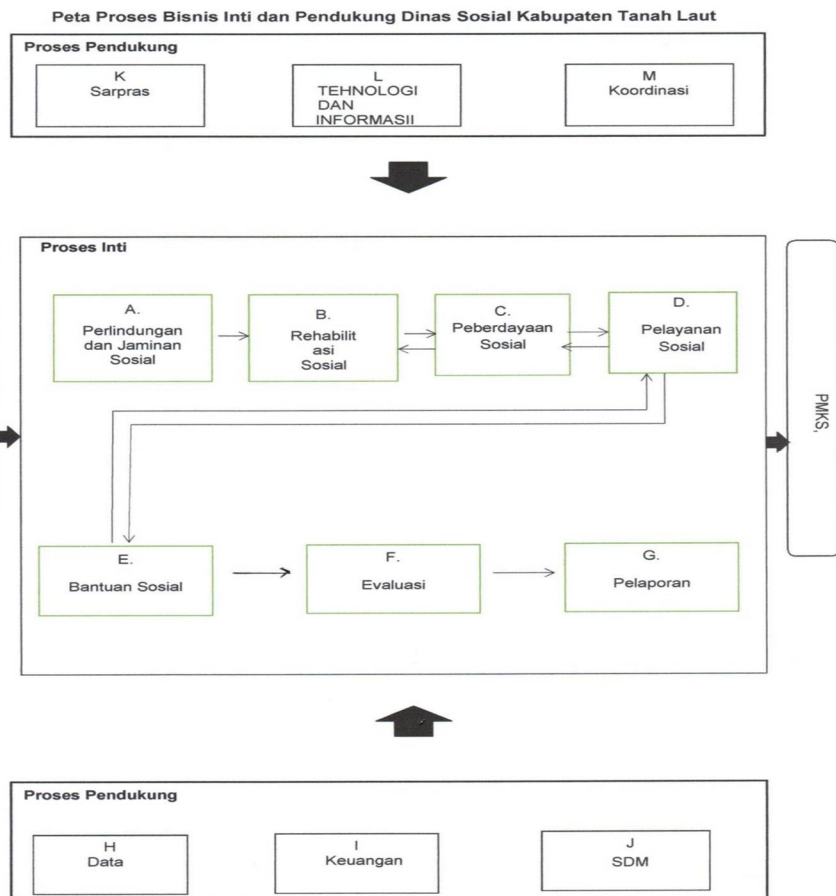


DINAS SOSIAL

E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi,

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial telah membuat peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi Dinas Sosial agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Adapun Peta Proses Bisnis tersebut :





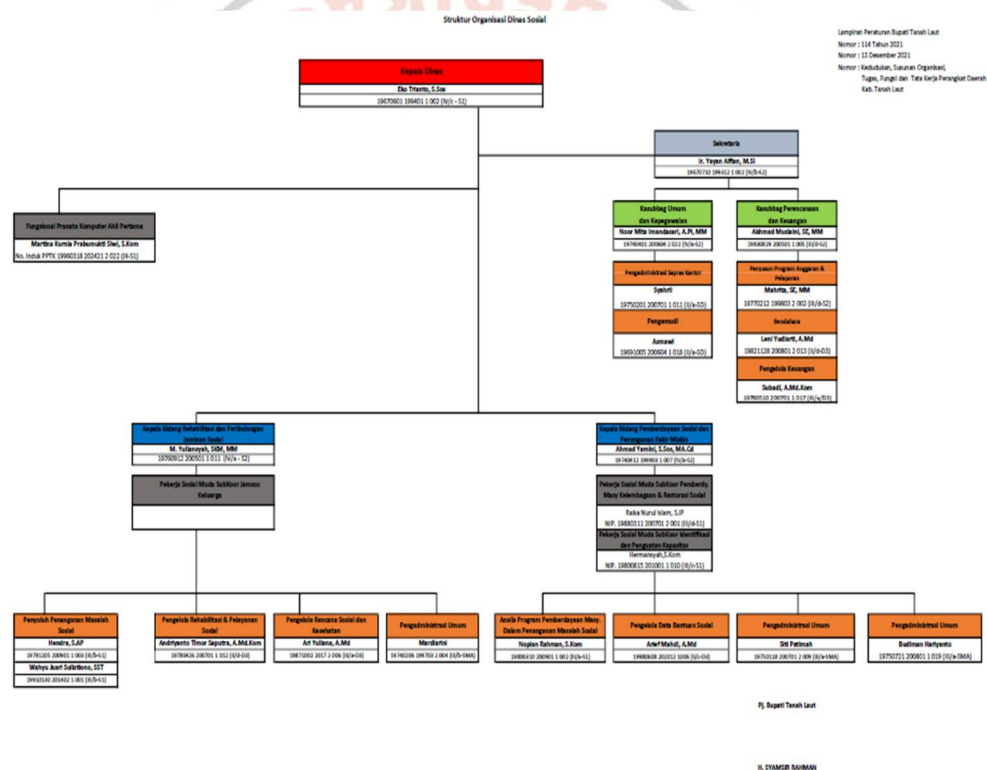
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan dinas teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang sosial;

- 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) pembinaan UPT Dinas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut adalah :



Gambar E.2 Struktur Organisasi

F. Isu Strategis

Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat

akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas dan berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta dapat menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu Strategis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial lima tahun ke depan yang patut mendapat perhatian antara lain :

1. Jangkauan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau mereka yang tinggal di daerah pedesaan secara merata.
2. Belum tersedianya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Fakir Miksin dan Orang Tidak Mampu yang valid dan akurat.
3. Usaha pembangunan kesejahteraan sosial belum mampu mencapai seluruh aspek Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Keterbatasan dana dan peralatan penanggulangan bencana.
5. Terbatasnya pekerja sosial profesional yang mampu dalam melaksanakan tugas penanganan masalah kesejahteraan sosial.
6. Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) meliputi kedisabilitas, kerawanan, keterlantaran, kemiskinan dan penanggulangan bencana belum optimal.
7. Kelembagaan sosial belum tersedia dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
8. Organisasi sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum berperan dengan baik/optimal.
9. Masih terbatasnya akses Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap pelayanan sosial dasar.
10. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran/pemahaman masyarakat dalam gerakan kesetiakawanan sosial.
11. Belum optimalnya implementasi berbagai kebijakan dan peraturan daerah terkait dengan penanganan PPKS, lemahnya pengawasan dan pendampingan terhadap PPKS yang berada di desa-desa.
12. Keberadaan PPKS di Kabupaten Tanah Laut juga tidak terlepas dari kurang optimalnya penanganan serta kepedulian anggota keluarga atau



BAB I

PENDAHULUAN

kerabat terhadap PPKS sehingga tidak jarang terdapat PPKS yang menolak untuk kembali ke keluarga atau diterlantarkan oleh keluarganya sendiri.

Produk Layanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu : ***Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)***, dan visi ***Dinas Sosial Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)***, maka dapat diuraikan produk dan layanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

Tabel F.1 Produk dan Layanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

No	Jenis Layanan	Sasaran	Pelayanan yang diberikan	Penanggungjawab
1	Rehabilitasi Sosial	- Penyandang Disabilitas	- Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang disabilitas - Pemenuhan kebutuhan dasar - Konseling - Pendampingan sosial - Layanan rujukan	Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
		- Lanjut Usia Terlantar	Pemenuhan kebutuhan dasar	Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.



BAB I

PENDAHULUAN

		- Keluarga bermasalah psikologis	Konseling Keluarga	Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
		- Korban tidak kekerasan	Konseling	Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
		- Wanita Rawan Sosial ekonomi (WRSE)	Pendidikan Pelatihan dan pendampingan	Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
		- Gelandangan pengemis dan orang terlantar	Bimbingan Mental, spiritual, Rujukan, pendampingan dan Reunifikasi keluarga	Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
		- Anak berhadapan dengan hukum	Pendampingan	Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
2	Layanan Kedaruratan	- Orang terlantar, eks Narapidana, ODGJ dan Mayat Terlantar	Rujukan, Reunifikasi Keluarga, Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Sandang.	Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
3	Perlindungan Sosial	- Korban Bencana Alam dan Sosial	Bantuan Logistik, Dapur umum, Pengungsian dan	Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.



BAB I
PENDAHULUAN

			pendampingan Sosial	
4	Bantuan Sosial	- Lansia Terlantar - Penyandang Disabilitas	Bantuan Sosial dalam bentuk barang,	Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
5	Jaminan Sosial	- Keluarga sangat miskin	Pemenuhan kebutuhan dasar	Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
		- Lanjut Usia Non Potensial	Pemenuhan kebutuhan dasar	Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
		- Penyandang Disabilitas Berat	Pemenuhan kebutuhan dasar	Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
		- Anak Terlantar	- Pendataan - Penjangkauan - pemantauan	Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
6	Pemberdayaan Sosial	- Keluarga Miskin	Bantuan Stimulan, Pendampingan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin
		- Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pembinaan, bimbingan Teknis dan	Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin



BAB I PENDAHULUAN

		- Taman Makam Pahlawan dan Situs Perjuangan	Pemeliharaan	Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin
7	Pengumpulan dan Pengolahan Data	- Keluarga Miskin, PMKS, Peserta Jaminan Kesehatan, KPM Penerima Bantuan Sosial	Pendataan PMKS, Pengelolaan Data Kemiskinan, Verifikasi dan Validasi Data	Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut :

**Tabel G.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut**

NO	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Kadis	Sekretariat	Bid. Pembd Sos & Pengn FakMis	Bid. Rehab & PrIndngn JamSos	Jumlah
1	P N S				22		
	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1	-	-	-	1
-	Pembina Tk.I	(IV/b)	-	1	-	-	1
	Pembina	(IV/a)	-	1	1	1	3
	Penata Tingkat I	III/d	-	2	1	-	3
	Penata	III/c	-	-	1	1	2



BAB I

PENDAHULUAN

	Penata Muda Tk.I	III/b	-	-	1	2	3
	Penata Muda	III/a	-	1	2	2	5
	Pengatur Tk.I	II/d	-	1	1	-	2
	Pengatur	II/c	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda	II/a	-	2	-	-	2
	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	-	-
	Juru	I/c	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tk I	I/b	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-
2	Honoror Daerah	-	-	-	-	-	-
3	PTT/Sukwan/Kontrak	PTT	-	15	-	-	15
4	PPPK	IX	-	1	-	-	1

Penjelasan Bagan :

Struktur Organisasi SKPD ditunjuk untuk menunjukkan Organisasi, jumlah personil dan Tata laksana Dinas Sosial untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan Dinas Sosial dibantu oleh satu Sekretariat dan dua Bidang yang terdiri dari :

1. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
3. Bidang Pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin



BAB I
PENDAHULUAN

Tabel G.2

Sarana-Prasarana



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DAFTAR ASET
GEDUNG BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2024

PER 31-Des-2024

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
Bidang : Bidang Sosial
Unit Organisasi : Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : Dinas Sosial
U P B : Dinas Sosial

NO		ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
				5.113.771.702,00
	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL		1 40,00	18.100.000,00
	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen		40,00	18.100.000,00
	1.Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Jl. H. Boejasin Pelaihari	40,00	18.100.000,00
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN		1 144,00	173.968.000,00
	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen		144,00	173.968.000,00
	1.Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Jl. A. Yani Kelurahan Angsau	144,00	173.968.000,00
	BANGUNAN KESEHATAN		4 1.027,00	1.826.110.416,00
	Bangunan Rumah Sakit Umum		1.027,00	1.826.110.416,00
	1.Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. H. Boejasin Pelaihari		69.550.000,00



BAB I

PENDAHULUAN

	2.Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. H. Boejasin Pelaihari		310,00	119.800.000,00
	3.Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. H. Boejasin Pelaihari		255,00	1.121.432.416,00
	4.Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. H. Boejasin Pelaihari		462,00	515.328.000,00
	BANGUNAN PENINGGALAN		1	480,00	1.760.475.786,00
	Makam Bersejarah			480,00	1.760.475.786,00
	1.Makam Bersejarah	Jl. A. YANI Panggung (Taman Makam Pahlawan Bumi Tuntung Pandang)		480,00	1.760.475.786,00
	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN		1	90,00	980.446.000,00
	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen			90,00	980.446.000,00
	1.Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Jalan Abadi Kel. Pelaihari		90,00	980.446.000,00
	PAGAR		2	300,00	354.671.500,00
	Pagar Permanen			300,00	354.671.500,00
	1.Pagar Permanen	Jl. A. Yani Kelurahan Pabahanan			279.091.500,00
	2.Pagar Permanen	Jl. A. Yani Taman Makam Muslimin Matah		300,00	75.580.000,00
					5.113.771.702,00



DAFTAR ASET TETAP

PERALATAN MESIN

TAHUN ANGGARAN 2024

PER 31-Des-2024

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
Bidang : Bidang Sosial
Unit Organisasi : Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : Dinas Sosial
U P B : Dinas Sosial

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Sosial	576	3.805.198.819,59
	ALAT BESAR	15	14.560.000,00
	- Pompa Air	3	2.200.000,00
	- Veld Bed	12	12.360.000,00
	KOMPUTER	132	938.298.500,00
	- P.C Unit	44	477.966.000,00
	- Lap Top	18	231.750.000,00
	- Note Book	5	65.353.000,00
	- Monitor	1	3.501.750,00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	33	97.716.000,00
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	24.400.000,00



BAB I

PENDAHULUAN

- External/ Portable Hardisk	20	22.750.750,00
- Peralatan Personal Komputer lainnya	1	4.070.000,00
- Router	1	1.500.000,00
- Wireless Access Point	5	9.291.000,00
ALAT KESELAMATAN KERJA	4	84.747.000,00
- Tenda	3	50.237.000,00
- alat sar lainnya lainnya (dst)	1	34.510.000,00
ALAT ANGKUTAN	36	1.758.399.929,29
- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5	1.024.704.250,00
- Pick Up	1	252.670.000,00
- Sepeda Motor	30	481.025.679,29
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1	950.000,00
- Termometer Standar	1	950.000,00
ALAT PERTANIAN	2	3.634.545,00
- Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	3.004.545,00
- Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	630.000,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	350	796.916.795,30
- Lemari Besi/Metal	8	30.625.000,00
- Lemari Kayu	7	10.517.500,00
- Rak Kayu	2	3.250.000,00
- Filing Cabinet Besi	17	33.518.520,00
- Lemari Kaca	5	9.596.000,00
- Alat Penyimpanan Kantor lainnya	2	11.000.000,00
- CCTV - Camera Control Television System	2	9.150.000,00
- White Board	1	950.000,00
- LCD Projector/Infocus	1	12.500.000,00
- Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	4.100.000,00
- Papan Tulis	1	900.000,00
- Meja Kerja Kayu	52	90.997.156,00
- Kursi Kayu	4	2.324.000,00
- Meja Rapat	17	23.350.000,00
- Meja Resepsionis	1	15.000.000,00
- Meja Panjang	4	6.800.000,00
- Kasur/Spring Bed	10	14.500.000,00
- Meja Makan Kayu	5	12.800.000,00
- Kursi Rapat	1	800.000,00
- Kursi Tamu	9	34.697.828,00
- Kursi Putar	15	28.261.940,00
- Kursi Biasa	56	49.500.275,00
- Bangku Tunggu	8	14.817.299,97
- Meja Komputer	6	6.000.000,00
- Sofa	1	1.500.000,00
- Mesin Pel/Poles	1	1.000.000,00
- Mesin Pemotong Rumput	1	4.900.000,00



BAB I

PENDAHULUAN

- Mesin Cuci	1	4.200.000,00
- Alat Pembersih lainnya	9	9.360.000,00
- Lemari Es	3	11.700.000,00
- A.C. Window	2	6.300.000,00
- A.C. Split	28	142.983.000,00
- Kipas Angin	2	2.400.000,00
- Kompor Gas (Alat Dapur)	8	6.320.000,00
- Tabung Gas	8	5.264.303,00
- Treng Air/Tandon Air	4	7.500.000,00
- Rak Piring Aluminium	1	1.300.000,00
- Televisi	7	33.897.000,00
- Sound System	3	20.300.000,00
- Megaphone	3	4.950.000,00
- Stabilisator	2	1.026.333,33
- Tangga Aluminium	1	1.250.000,00
- Dispenser	2	1.633.000,00
- Handy Cam	3	28.150.000,00
- Karpas	2	1.600.000,00
- Gordyir/Kray	1	31.452.000,00
- DVD Player	1	2.000.000,00
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	7.356.540,00
- Alat Pemadam/Portable	4	4.269.100,00
- Alat Pemadam Kebakaran lainnya	7	18.050.000,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	2.575.000,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	2.575.000,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2.575.000,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	2.575.000,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	32	199.688.250,00
- Audio Mixing Stationer	1	2.486.950,00
- Microphone/Wireless MIC	1	1.660.000,00
- Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	9.250.000,00
- Power Amplifier	1	3.576.650,00
- Camera Electronic	3	38.050.000,00
- Tripod Camera	1	1.450.000,00
- Lighting Stand Tripod	1	1.300.000,00
- Layar Film/Projector	3	25.350.000,00
- Alat Studio Lainnya	3	37.620.000,00
- Handy Talky (HT)	8	23.840.000,00
- Facsimile	1	1.904.650,00
- Antene SHF Portable	1	2.000.000,00
- Genset	3	51.200.000,00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	3.503.800,00
- Instrumen Cabinet	1	3.503.800,00
ALAT LABORATORIUM	3	4.500.000,00



BAB I
PENDAHULUAN

-	Uninterrupted Power Supply (UPS)	3	4.500.000,00
J U M L A H		576	3.805.198.819,59

Dari tabel di atas maka sarana dan prasarana di dinas sosial terdiri dari 2 (dua) yaitu daftar aset gedung bangunan yang terdiri dari bangunan gedung pendidikan permanen seluas 144 M², Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan permanen seluas 90 M², Makam Bersejarah seluas 480 M² serta Pagar Permanen seluas 300 M² dan daftar aset tetap peralatan mesin yang berjumlah 574 buah

**Tabel G.3 Data Perbandingan Realisasi anggaran Tahun 2023
terhadap Tahun 2024**

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
BELANJA DAERAH	13.217.317.089	9.655.124.868,-	73,05
BELANJA OPERASI	12.806.809.807,-	9.336.509.158,-	72,90
Belanja Pegawai	4.166.000.260,-	3.365.538.103,-	80,79
Belanja Barang dan Jasa	4.218.119.547,-	2.577.251.055,-	61,10
Belanja Bantuan Sosial	4.422.690.000,-	3.393.720.000	76,73
BELANJA MODAL	410.507.282,-	318.615.710,-	77,62
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.507.282,-	252.780.210,-	95,21
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.000.000,-	49.900.000,-	39,92
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-	0



BAB I
PENDAHULUAN

Jumlah	13.217.317.087,-	9.655.124.868,-	73,05
---------------	-------------------------	------------------------	--------------

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	12.681.349.495	10.479.651.184	82,64	9.655.124.868
5.1	BELANJA OPERASI	12.027.175.320	9.873.232.148	82,09	9.336.509.158
5.1.01	Belanja Pegawai	4.281.144.053	3.679.187.607	85,94	3.365.538.103
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.988.858.267	3.564.604.541	89,36	2.577.251.055
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.757.173.000	2.629.440.000	69,98	3.393.720.000
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12.027.175.320	9.873.232.148	82,09	9.336.509.158
5.2	BELANJA MODAL	654.174.175	606.419.036	92,70	318.615.710
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	531.428.534	499.085.250	93,91	252.780.210
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.745.641	70.933.786	97,51	49.900.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0	15.935.500
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000	36.400.000	72,80	318.615.710
	JUMLAH BELANJA	654.174.175	606.419.036	92,70	318.615.710



BAB I
PENDAHULUAN

	MODAL				
	JUMLAH BELANJA	12.681.349.495	10.479.651.184	82,64	9.655.124.868
	SURPLUS/DEFISIT	(12.681.249.495)	(10.479.651.184)	82,64	(9.655.124.868)

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 maka Dinas Sosial Kabupaten telah menindak lanjuti keseluruhan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 yaitu :

Tabel H.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut





BAB I

PENDAHULUAN

NO	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status / Progres Penyelesaian	Keterangan
A. Perencanaan Kinerja				
1.	Dokumen perencanaan kinerja yang telah diselaraskan agar dipertahankan, bila perlu dilakukan evaluasi berkala sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja	IKU Eselon II dan IKU Eselon III dari Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja sudah dipertahankan keselarasannya. Begitu juga dengan Kinerja Eselon IV sudah dipertahankan keselarasannya sesuai Sub Kegiatan di Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.	Selesai	Dipertahankan dan dilanjutkan untuk ke depan
2	Dokumen perencanaan agar dilakukan reviu secara berkala dengan membuat laporan hasil reviu sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan pencapaian kinerja	Dokumen perencanaan sudah dilakukan reviu secara berkala dengan membuat laporan hasil reviu dan dijadikan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan pencapaian kinerja	Selesai	Dipertahankan dan dilanjutkan untuk ke depan
B. Pengukuran Kinerja				
1.	Agar dilakukan monitoring secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja dan dilakukan secara berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala – kendala dalam pencapaian	Dinas Sosial melakukan monitoring secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja dan dilakukan secara berjenjang pada unit kerja dibawahnya dan telah diketahui kendala – kendala	Selesai	Dilanjutkan untuk ke depan



BAB I

PENDAHULUAN

NO	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status / Progres Penyelesaian	Keterangan
	target kinerja dan dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja.	dalam pencapaian target kinerja dan dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja.		
2.	Perlunya pemberian reward dan punishment atas hasil pencapaian kinerja dari perjanjian kinerja yang telah disepakati.	Dinas Sosial telah menerapkan pemberian reward dan punishment atas hasil pencapaian kinerja dari perjanjian kinerja	Selesai	Dilanjutkan pada tahun 2024
3	Hasil monitoring pencapaian kinerja yang dilakukan secara berkala agar dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja.	Hasil monitoring pencapaian kinerja dilakukan secara berkala dan dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja	Selesai	Dilanjutkan untuk ke depan
C. Pelaporan Kinerja				
1.	Untuk menjamin keandalan data kinerja, agar ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja	Kasubag Perencanaan dan Keuangan berserta 2 orang staf dibawah Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dipercaya untuk mengumpulkan data	Selesai	Dilanjutkan untuk ke depan
2.	Agar dalam laporan kinerja menyajikan efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mencapai target kinerja pada masing-masing indikator	Laporan Kinerja pada BAB III Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut akan menyajikan efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mencapai target kinerja pada masing-masing indikator.	Selesai	Dilanjutkan untuk ke depan



BAB I

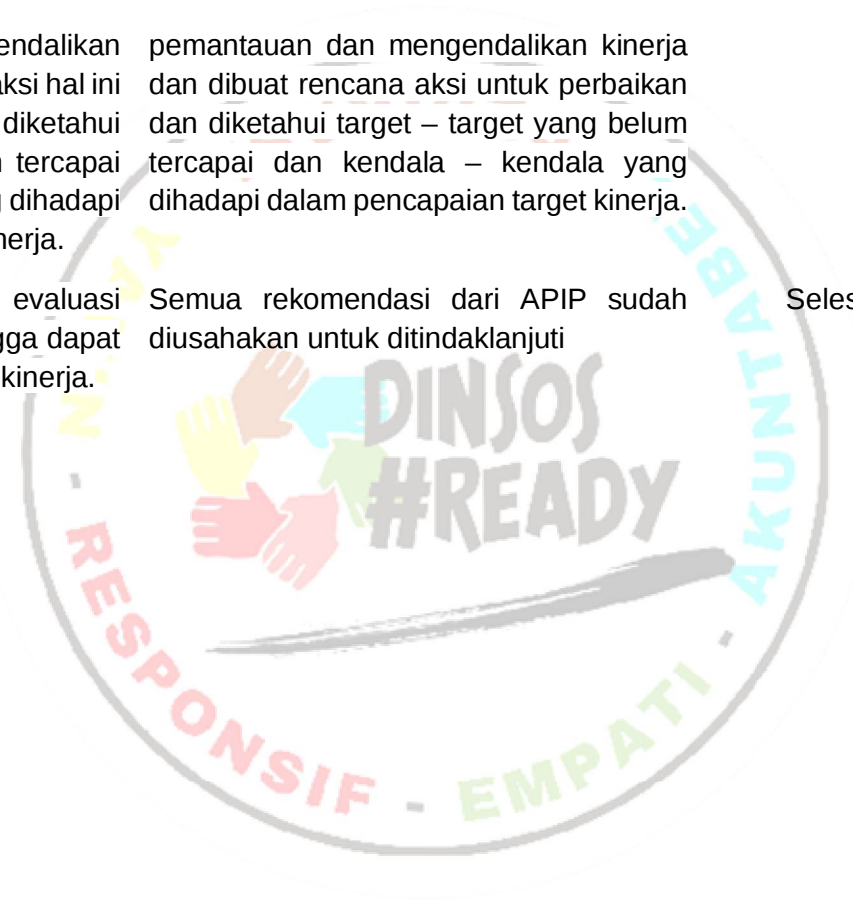
PENDAHULUAN

NO	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status / Progres Penyelesaian	Keterangan
3.	Agar laporan kinerja menyajikan informasi peran masing-masing bidang termasuk peran SKPD lain,).dukungan dari pemerintah pusat (Crosscutting) untuk mendukung capaian IKU dinas.	Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut akan menyajikan informasi peran masing-masing bidang juga termasuk peran SKPD Lain yang mendukung capaian IKU Dinas.	Selesai	Dilanjutkan untuk ke depan
3.	Agar laporan kinerja menyajikan capaian Standart Pelayanan Minimal Bidang urusan Sosial.	Dinas Sosial akan menyajikan capaian Standart Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial	Selesai	Dilanjutkan untuk ke depan
	Agar dilakukan reviu secara berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.	Dinas Sosial melakukan reviu secara berjenjang atas laporan kinerja yang disusun.	Selesai	Dilanjutkan untuk ke depan
	Agar dalam laporan kinerja menyajikan perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan	Dinas Sosial telah menyajikan perbaikan dan penyempurnaan kinerja.	Selesai	Dilanjutkan untuk ke depan
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
1.	Agar dilakukan evaluasi kinerja internal yang merupakan bentuk	Dinas Sosial akan melakukan evaluasi kinerja internal yang merupakan bentuk	Selesai	Dilanjutkan untuk ke depan



BAB I
PENDAHULUAN

NO	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status / Progres Penyelesaian	Keterangan
	pemantauan dan mengendalikan kinerja dan dibuat rencana aksi hal ini untuk perbaikan dan akan diketahui target – target yang belum tercapai dan kendala – kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.	pemantauan dan mengendalikan kinerja dan dibuat rencana aksi untuk perbaikan dan diketahui target – target yang belum tercapai dan kendala – kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.		
	Agar rekomendasi hasil evaluasi APIP ditindak lanjuti, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.	Semua rekomendasi dari APIP sudah diusahakan untuk ditindaklanjuti	Selesai	Dilanjutkan untuk ke depan





BAB II

Perencanaan kinerja

I. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. KATA PENGANTAR
2. IKHTISAR EKSEKUTIF
3. DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis Perangkat Daerah
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Tujuan, Sasaran Kabupaten
- B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- F. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - a. Pencapaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah (IKU Eselon II)
 - b. Analisa Capaian kinerja tahun 2024 dan perbandingan kinerja tahun 2023 dengan realisasi



BAB II

Perencanaan kinerja

- c. Analisa keberhasilan/kegagalan, hambatan dan langkah-langkah antisipasi yang di ambil

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN :

1. IKU
2. Pohon Kinerja
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja
4. Capaian Kinerja Per Triwulan 1 s.d IV
5. Monev Renstra
6. Matriks Keselarasan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran Kabupaten

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Dokumen RPD ini mencakup berbagai kebijakan dan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Tanah Laut akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut berakhir pada tahun 2023.

Tujuan kabupaten berdasarkan rencana strategis kabupaten adalah menurunnya beban pengeluaran masyarakat miskin dengan indikator indeks kedalaman kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Kenaikan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan atau dihasilkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut



BAB II

Perencanaan kinerja

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan strategis ini dapat menjadi sarana bagi Dinas Sosial untuk secara cepat dan tepat mengetahui apa yang harus segera diwujudkan oleh segenap jajaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Dinas Sosial kepada Bupati Tanah Laut atas capaian kinerja untuk indikator-indikator sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Sosial Tahun 2024. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diharapkan dapat dijadikan sarana bagi Bagian-Bagian di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan pengukuran sejauh mana kegiatan yang dilakukan telah memberikan akses terhadap pencapaian tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan.

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut lima tahun kedepan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Didasarkan kepada analisa kondisi umum lingkungan dan ruang Kabupaten Tanah Laut serta hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan periode sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, kekuatan, peluang, tantangan, dan ancaman dalam pelayanan bidang sosial ke depan.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang digunakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Selain itu, indikator kinerja utama digunakan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel B.3 Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama/ Tujuan. Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung jawab
1	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mandiri (%)	$\sum \frac{PPKS \text{ yang Mandiri}}{PMKS \text{ Tahun } N} \times 100$	Kepala Dinas

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome*



BAB II

Perencanaan kinerja

yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA DINAS		
Sasaran	Indikator kinerja	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	75 Nilai
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	5%
SEKRETARIS		
Sasaran	Indikator kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24 Nilai
	Nilai Komponen Pengukuran	24 Nilai
	Nilai Komponen Pelaporan	12 Nilai
	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20 Nilai
	Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	90 Nilai



BAB II

Perencanaan kinerja

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN		
Sasaran	Indikator kinerja	Target
Meningkatnya Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial	Persentase Bantuan Sosial Tepat Sasaran	100%
Meningkatnya Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial	Persentase Bantuan Sosial Tepat Sasaran	100%
Terkelolanya Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang di Kelola	100%
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN		
Sasaran	Indikator kinerja	Target
Meningkatnya Perlindungan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS Yang Terlindungi Sesuai Kebutuhan	100%
Meningkatnya Perlindungan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS Yang Terlindungi Sesuai Kebutuhan	100%
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN		
Sasaran	Indikator kinerja	Target
Memastikan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas tersusun dengan baik	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%
Terciptanya Pelayanan Administrasi Keuangan yang Bersih dan Optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Indeks
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen



BAB II

Perencanaan kinerja

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN		
Sasaran	Indikator kinerja	Target
Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Urusan Perangkat Daerah	3 indeks
Memastikan Pengadaan Barang Milik daerah Sesuai dengan Kebutuhan	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 indeks
Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 indeks
Memastikan Barang Milik daerah terpelihara dengan baik	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 indeks
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	31 Paket
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	19 Paket
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Laporan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	35 Unit
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 Unit
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dijabarkan dalam sasaran strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Instrumen Pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk perjanjian kinerja tahun 2024 di lingkungan Dinas Sosial adalah program dan kegiatan yang mengacu pada Kepmendagri 050-5889 yaitu



BAB II

Perencanaan kinerja

Tabel D.1 Program dan Kegiatan yang mendukung

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Program (sesuai Kepmendagri 050-5889)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.942.257	Rp 5.942.065
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4.999.811	Rp 5.952.021
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.281.144.053	Rp 4.281.144.053
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 4.999.781	Rp 5.997.449



BAB II

Perencanaan kinerja

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.151.592	Rp 3.320.662
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 23.677.917	Rp 43.637.014
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 2.996.674	Rp 3.661.724
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp 3.892.707	Rp 13.724.608
			Penyediaan Bahan/Material	Rp 16.000.000	Rp 16.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 249.996.618	Rp 349.946.618
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp -	Rp -
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2.000.000	Rp. 2.000.000



BAB II

Perencanaan kinerja

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 296.478.824	Rp 161.478.824
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 802.843.968	Rp 752.843.968
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 30.000.000	Rp 35.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 200.000.000	Rp. 210.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 17.000.000	Rp 17.000.000
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 49.824.000	Rp. 49.824.000



BAB II

Perencanaan kinerja

			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 14.805.130	Rp. 14.805.130
2	PROGRAM PEMBERDAY AAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp. 3.993.081	Rp. 3.993.081
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp 38.904.412	Rp 38.904.412
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp 185.395.509	Rp185.395.509



BAB II

Perencanaan kinerja

			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp 248.780..201	Rp 248.780..201
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Rp 3.654.892.485	Rp 3.654.892.485
			Alat Bantu	Rp 39.993.000	Rp 39.993.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp 49.989.171	Rp 49.989.171
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp 224.485.625	Rp 224.485.625
			Pemberian Layanan Rujukan	Rp 5.000.000	Rp 7.000.000
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp 19.939.776	Rp 19.939.776



BAB II

Perencanaan kinerja

	JAMINAN SOSIAL				
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	Rp 19.999.696	Rp 19.999.696
			Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Rp. 29.999.868	Rp. 29.999.868
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 249.925.328	Rp 249.925.328
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 374.962.745	Rp 424.962.745
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 63.955.022	Rp 77.301.551
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp 109.972.065	Rp 124.952.085
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Rp 1.377.028.266	Rp 983.548.801



BAB II

Perencanaan kinerja

			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp. 44.153.534	72.569.534
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp 79.611.759	Rp 79.611.759
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan prasarana Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Rp 72.745.641	Rp 72.745.641
			Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 100.081.111	Rp 100.081.111
				Rp 13.001.561.627	Rp 12.681.349.495

Pelaksanaan rencana kerja Tahun 2024 secara umum telah terlaksana dengan baik. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tertuang dalam program dan kegiatan yang terdiri dari 6 program dan 14 kegiatan dan 40 Sub kegiatan.



BAB III

Akuntabilitas kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Selain itu realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2024.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah Program, Kegiatan, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana program, kegiatan, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan saat ini dan kedepan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut harus mampu mengembangkan inovasi agar pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi masyarakat dapat ditangani dengan lebih cepat, tepat dan manfaat.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dan penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi salah satu sasaran strategis dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial tersebut. Menurut Permensos Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terdapat 26 jenis PPKS yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, berikut adalah tabel rakapitulasi data PPKS di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024.

Tabel 3.1**Rekapitulasi Data PPKS****Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024**

NO.	PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	KAB. TALA
1	Anak Balita Terlantar	2
2	Anak Terlantar	60
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	0
4	Anak Jalanan	0
5	Anak dengan kedisabilitasan (ADK)	89
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	5

7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	3
8	Lanjut Usia Terlantar	1.966
9	Penyandang Disabilitas	619
10	Tuna Susila	0
11	Gelandangan	0
12	Pengemis	0
13	Pemulung	0
14	Kelompok Minoritas	0
15	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	0
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0
18	Korban Traffiking	0
19	Korban Tindak Kekerasan	0
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
21	Korban Bencana Alam	7.000

22	Korban Bencana Sosial	0
23	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.869
24	Fakir Miskin (FM)	3.194
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0
	TOTAL	32.911

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa ada penurunan angka PPKS pada tahun 2023 dari 125.970 Jiwa menjadi 32.911 jiwa pada tahun 2024 atau menurun sekitar 93.059 jiwa atau 73,87 %. Menurunnya angka PPKS di Kabupaten Tanah Laut dikarenakan data yang dipakai untuk tahun 2024 adalah data yang bersumber dari Data terpadu Sosial Banua (Datu Soban) yang merupakan Data PPKS daerah yang telah di verifikasi dan validasi data secara masif dan menjadikan data PPKS yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut menjadi valid.

Dari 26 jenis PPKS tersebut di atas hanya sekitar 16 (Enam belas) jenis PPKS yang terdata dan menjadi sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu :

Tabel 3.2
Jumlah PPKS yang dapat ditangani Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

NO.	PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	KAB. TALA
1	Anak Balita Terlantar	2

2	Anak Terlantar	23
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	24
4	Anak dengan kedisabilitasan (ADK)	89
5	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	3
6	Lanjut Usia Terlantar	1.966
7	Penyandang Disabilitas	483
8	Tuna Susila	0
9	Gelandangan	23
10	Pengemis	0
11	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0
12	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0
13	Korban Bencana Alam	6.427
14	Korban Bencana Sosial	120
15	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	28
15	Fakir Miskin (FM)	2.258

16	Anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah	5
	TOTAL	28.327

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 28.327 PPKS yang telah ditangani yang terdiri dari 16 (enam belas) jenis PPKS yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dari 16 (enam belas) jenis PPKS yang paling banyak mendapat penanganan adalah Korban Bencana Alam sebanyak 6.427 Jiwa atau sekitar 22,69 % dan Fakir Miskin sebesar 2.258 jiwa atau sekitar 7,97 %. Hal ini di pengaruhi oleh kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 seperti bencana banjir.

Program penanganan fakir miskin yang ada di Kabupaten Tanah Laut dilakukan optimalisasi pada tahun 2024 dengan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pemberian Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Tabel 3.3

PERBANDINGAN DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2023 PADA KABUPATEN LAIN DAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DATA TAHUN 2024

No.	JENIS PPKS	KABUPATEN/KOTA					
		KOTA BARU	BANJAR	BATOLA	TAPIN	TANAH LAUT	
		2023	2023	2023	2023	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	0	0	170	2	0	2
2	Anak Terlantar	22	211	52	376	0	60

3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	15	0	11	33	1	0
4	Anak Jalanan	0	0	0	0	0	0
5	Anak dengan Kedisabilitasana (ADK)	126	385	94	105	12	89
6	Anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah	0	0	0	2	5	5
7	anak yang memerlukan perlindungan khusus	0	0	13	0	0	3
8	Lanjut Usia Terlantar	108	1.847	92	669	7	1.966
9	Penyandang Disabilitas	242	2.364	687	551	13	619
10	Tuna Susila	0	0	0	0	0	0
11	Gelandangan	5	3	2	0	0	0
12	Pengemis	0	0	5	3	4	0
13	Pemulung	0	2	3	0	16	0
14	Kelompok Minoritas	0	0	0	7	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permayarakatan	0	5	4	1	0	0

16	Orang dengan HIV/AIDS	0	0	0	7	0	0
17	Korban Penyalahgunaan Napza	56	0	0	0	0	0
18	Korban Trafficking	0	0	0	0	2	0
19	Korban Tindak Kekerasan	0	0	0	0	0	0
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0	0	2	0	0
21	Korban Bencana Alam	71	129	31	66	10	7.000
22	Korban Bencana Sosial	26	108	35	112	12	0
23	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	768	16	46	179	755	2.869
24	Fakir Miskin	58.745	173.137	14.978	12.110	60.492	20.298
25	Keluarga bermasalah sosial psikologi	0	0	0	0	3	0
26	Komunitas Adat Terpencil	429	0	0	0	0	0
Jumlah		60.613	178.207	16.223	14.225	61.332	32.911

a. Pencapaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah (IKU SKPD/Eselon II)

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan sosial merupakan perubahan sosial bersifat komprehensif yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sasaran strategis sebagaimana sasaran pada Renstra Dinas Sosial Tahun



BAB III

Akuntabilitas kinerja

2024 – 2026 yang telah dirumuskan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Capaian Target dan Capaian IKU SKPD/Kepala Dinas Sosial Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PPKS yang mandiri	17,5%	17,06%	97,47%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	BB (75)	BB(73,95)	98,6%
Rata-rata					111,60%

Sasaran dan indikator kinerja **persentase PPKS yang mandiri** diperlukan untuk mengukur efektivitas program pemberdayaan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dengan adanya sasaran yang jelas, pemerintah atau lembaga terkait dapat :

1. **Menilai Keberhasilan Program** – Mengukur sejauh mana PPKS dapat mandiri setelah mendapatkan intervensi.
2. **Mengidentifikasi Kesenjangan** – Mengetahui aspek mana yang masih perlu ditingkatkan dalam program pemberdayaan.
3. **Efisiensi dan Akuntabilitas** – Memastikan bahwa anggaran dan sumber daya digunakan secara optimal untuk meningkatkan kemandirian PPKS.
4. **Perbaikan Kebijakan** – Menjadi dasar evaluasi untuk menyusun strategi yang lebih efektif di masa depan.



BAB III

Akuntabilitas kinerja

Dengan indikator kinerja ini, program dapat berjalan lebih terarah dan berdampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan PPKS. Sedangkan Sasaran dan indikator kinerja **Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Sosial** diperlukan untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program sosial. Beberapa alasan utamanya adalah:

1. **Meningkatkan Akuntabilitas** – Memastikan bahwa setiap program dan kegiatan Dinas Sosial memiliki dampak yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. **Efektivitas Pengelolaan Anggaran** – Mengoptimalkan penggunaan anggaran agar sesuai dengan target dan hasil yang diharapkan.
3. **Evaluasi dan Perbaikan Kinerja** – Menjadi alat ukur dalam menilai efektivitas kebijakan sosial dan memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan.
4. **Transparansi Publik** – Memberikan gambaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai capaian dan kinerja Dinas Sosial.

Dengan adanya sasaran dan indikator kinerja ini, Dinas Sosial dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi indikator kinerja dari tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI				TAHUN 2024		
			2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya penanganan masalah sosial bagi PMKS/ Meningkatkan kesejahteraan sosial PPKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri/ Persentase PPKS yang mandiri	6,98 %	56,32 %	11,99 %	29,37 %	17,5%	17,06%	97,47%
2	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	- 25,22 %	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PMKS yang tertangani/ Persentase PPKS yang Tertangani	- 29,37 %	87,02 %	95,04 %	99,93 %	-	-	-
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	-	-	-	-	BB (75)	BB(73,95)	98,6%

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TARGET AKHIR RPD	CAPAIAN TAHUN 2024 THD TARGET AKHIR RPD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Persentase PPKS yang Mandiri	%	17,5%	17,06%	97,47%	30%	20,77%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai	BB(75)	BB(73,95)	98,6%	BB(80)	95%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Sosial “Persentase PPKS yang Mandiri” diukur dengan rumus :

% PPKS yang menjadi
mandiri =

$$\frac{\text{PPKS Mandiri}}{\text{PPKS keseluruhan}} \times 100 \%$$

b. Analisa capaian kinerja tahun 2024 dan perbandingan kinerja tahun 2024 dengan realisasi

I. Indikator kinerja Kepala Dinas Sosial (Eselon II) “Persentase PPKS yang mandiri”

Untuk mengukur PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan, terlebih dahulu ditetapkan indikator PPKS Mandiri yaitu sebagai berikut :

No	Jenis PPKS	Kriteria Mandiri
1	Anak balita terlantar	Memiliki pengasuhan yang layak dan terpenuhi kebutuhan gizinya
2	Anak terlantar	Memiliki tempat tinggal, pendidikan, dan pengasuhan tetap
3	Anak berhadapan dengan hukum	Tidak mengulangi pelanggaran hukum dan memiliki kegiatan positif



BAB III

Akuntabilitas kinerja

4	Anak jalanan	Tidak tinggal di jalan dan mengikuti pendidikan atau pelatihan
5	Anak disabilitas	Mampu berpartisipasi dalam pendidikan dan kehidupan sosial dengan dukungan yang sesuai
6	Anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	Tinggal di tempat aman dan tidak mengalami kekerasan ulang
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Mendapat perlindungan dan layanan sesuai kebutuhannya
8	Lanjut usia terlanter	Memiliki tempat tinggal dan akses layanan dasar
9	Penyandang disabilitas	Mampu melakukan aktivitas mandiri dan diterima dalam masyarakat
10	Tuna susila	Memiliki pekerjaan/usaha yang layak dan diterima masyarakat
11	Gelandangan	Tinggal di tempat layak dan memiliki kegiatan produktif
12	Pengemis	Tidak mengemis lagi dan memiliki sumber penghasilan
13	Pemulung	Memiliki pekerjaan tetap atau usaha pengganti
14	Kelompok minoritas	Memiliki akses layanan publik dan tidak mengalami diskriminasi
15	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	Bekerja atau berusaha secara legal dan produktif
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Menjalani pengobatan rutin dan tidak mengalami stigma sosial
17	Korban penyalahgunaan napza	Bebas dari zat adiktif dan memiliki kegiatan produktif
18	Korban trafficking	Memiliki perlindungan hukum dan pekerjaan mandiri
19	Korban tindak kekerasan	Tinggal di lingkungan aman dan mendapat layanan pendampingan
20	Pekerja migran bermasalah sosial	Sudah kembali ke negara asal dan memiliki pekerjaan/usaha
21	Korban bencana alam	Tinggal di hunian tetap dan memiliki mata pencaharian kembali
22	Korban bencana sosial	Tinggal di lingkungan aman dan mendapat pendampingan sosial
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	Memiliki pendapatan tetap atau usaha yang menopang hidupnya
24	Fakir miskin	Memiliki penghasilan di atas garis kemiskinan



BAB III

Akuntabilitas kinerja

25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	Dapat menyelesaikan konflik internal dan memiliki pola asuh sehat
26	Komunitas adat terpencil	Memiliki akses terhadap layanan dasar dan kegiatan ekonomi lokal

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PPKS yang mandiri	17,5%	17,06%	97,47%

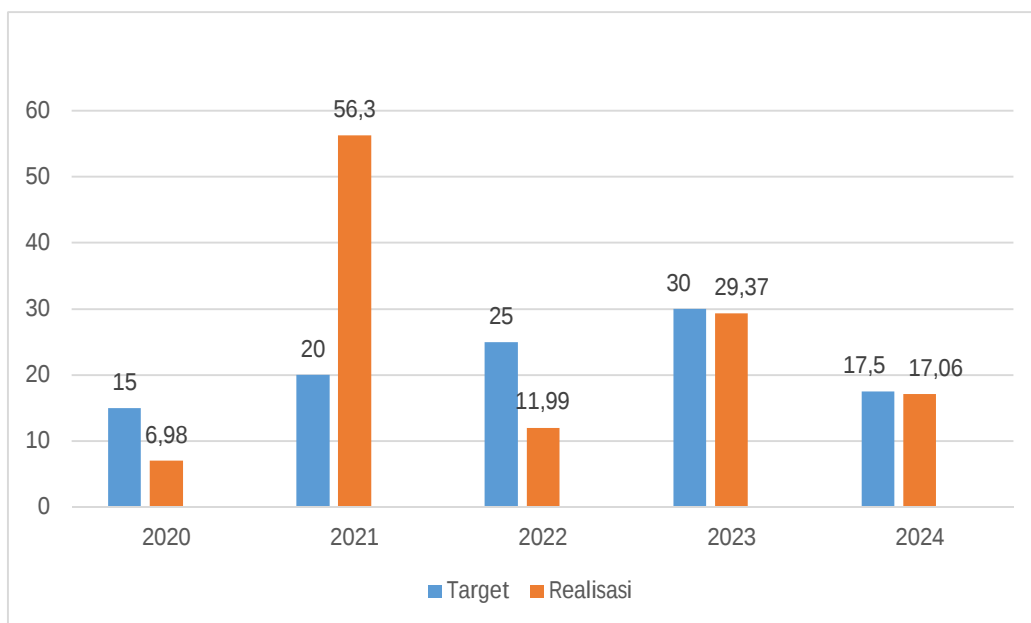
Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI				TAHUN 2024		
			2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya penanganan masalah sosial bagi PMKS/ Meningkatkan kesejahteraan sosial PPKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri/ Persentase PPKS yang mandiri	6,98 %	56,3 2%	11,99 %	29,37 %	17,5%	17,06%	97,47%

Grafik 3.1

**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
yang mandiri/ Persentase PPKS yang mandiri**



Berdasarkan tabel diatas Tingkat penanganan masalah sosial bagi PMKS/ Tingkat kesejahteraan sosial PPKS tahun 2024 dengan indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri/ Persentase PPKS yang mandiri terealisasi sebesar 17,06% dari yang ditargetkan sebesar 17,5% atau dengan capaian indikator sebesar 97,47%. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar 29,37% mengalami penurunan sebesar 12,31 Persen hal ini dikarenakan pada tahun 2023 target yang di tetapkan Dinas Sosial sebesar 30% dan dapat terealisasi sebesar 29,37%. Pencapaian realisasi tersebut dikarenakan Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri/ Persentase PPKS yang mandiri di Kabupaten Tanah Laut meningkat yaitu bencana alam dan sosial.

Sedangkan kalau dibandingkan dengan indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri/ Persentase PPKS yang mandiri di Kabupaten Tanah Laut dengan kabupaten lain yaitu kabupaten banjar, target serta realisasi indikator tersebut pada Kabupaten

Tanah Laut berada di bawah Kabupaten Banjar dikarenakan cakupan wilayah Kabupaten Banjar yang ditangani lebih luas.

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1 dengan
Kabupaten Lain

NO	KABUPATEN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tanah Laut	Persentase PPKS yang Mandiri	%	17,5%	17,06%	97,47%
2	Banjar	Persentase PPKS yang Mandiri	%	31%	61,23%	195,81%

PPKS dikatakan mandiri apabila memenuhi minimal 3 (tiga) kriteria indikator mandiri. Berdasarkan indikator tersebut, maka dapat dihitung dan ditetapkan PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Anak Terlantar Sebanyak 23 Orang
 2. Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebanyak 21 Orang
 3. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) sebanyak 89 Orang
 4. Anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah sebanyak 5 Orang
 5. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus sebanyak 3 Orang
 6. Penyandang disabilitas sebanyak 40 orang
 7. Gelandangan sebanyak 23 Orang
 8. Korban bencana alam sebanyak 5.216 jiwa
 9. Korban Bencana Sosial sebanyak 82 orang
 10. Wanita Rawan Sosial Ekonomi sebanyak 28 Orang
 11. Fakir Miskin yang mendapatkan program pemerintah yaitu PKH Graduasi Mandiri sebanyak 84 orang
- Jumlah seluruh PPKS yang menjadi Mandiri adalah sebanyak
Jumlah 5.614 Jiwa.

Rumus :

% PPKS yang menjadi
mandiri =

PPKS Mandiri	X 100 %
PPKS keseluruhan	

5.614	X 100 %
32.911	

17,06%

Berdasarkan uraian di atas bahwa capaian PPKS yang menjadi mandiri setelah ditangani tetapi belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 17,5 % dan tercapai sebesar 17,06 % dari target, hal ini menunjukkan bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan secara optimal tetapi belum dapat memenuhi target dengan kekurangan sebesar 0,44%.

1. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Memperhatikan tabel 3.4 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Kepala Dinas Sosial dengan sasaran “Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS” pada tahun 2024 dengan indikator Kinerja “Persentase PPKS yang mandiri” ditargetkan sebesar 17,5% dari populasi PPKS di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 sebanyak 32.911, sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi sebanyak 17,06% dengan capaian kinerja sebesar 97,47%. Capaian indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 4 Program dan 6 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp.6.532.251.526,- (Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).

Tabel 3.10
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Pendukung ke 1

No.		Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan

			Alat Bantu
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
			Pemberian Layanan Kedaruratan
			Pemberian Layanan Rujukan
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
			Rujukan Anak- Anak Terlantar
			Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota
			Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

			Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Indikator “Persentase PPKS yang mandiri” pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 12,31% akan tetapi penurunan kinerja tersebut tidak berpengaruh dengan kinerja Kepada Dinas Sosial dikarenakan realisasi kinerja tahun 2024 telah mencapai 97,47 dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 17,06% dari jumlah populasi dengan target yang telah ditetapkan dinas sosial sebesar 17,5% dari populasi sedangkan tahun 2023 terealisasi sebanyak 29,37% dari jumlah populasi dengan target yang telah ditetapkan dinas sosial sebesar 30% dari populasi. Berdasarkan hal tersebut maka terjadi peningkatan dari sasaran dan indikator yang dirumuskan dinas sosial, hal ini di karenakan telah optimalnya penanganan PPKS melalui optimalisasi layanan dengan Inovasi layanan seperti JOKJES (Pojok Kesejahteraan Sosial) di LKK Posyandu Kelurahan Pabahanan dan Rumah Singgah “AYANGJUKI” serta keterlibatan penanganan PPKS seperti Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti TKSK, PSM, Karang

Taruna, Puskesmas, TAGANA, Pelopor Perdamaian dan juga lintas sektor terkait seperti BAZNAS, Dinas Kesehatan, POLRES, BPBD, UPT PPA, Disnakertrans, Pengadilan Negera dan Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan dan lain-lain. Dinas sosial secara aktif mendorong peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk dapat semakin aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta melibatkan lintas sektor dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kapasitas PSKS pun terus dilakukan pembinaan dan pemberdayaan melalui bimbingan teknis (Bintek) dan pelatihan-pelatihan lainnya.



Pemberian bantuan
Bencana Sosial (Putting
Beliung)

Pelatihan
Kesiapsiagaan
Bencana Kebakaran
Lahan dan
Pemukiman





Pemberian bantuan
Bencana Sosial
(Kebakaran)



Pelayanan RS Ayang Juki



Pelayanan Orang Terlantar



Reunifikasi Keluarga



Reunifikasi Keluarga

1. Analisa Hambatan

Untuk Mencapai indikator Kinerja “Persentase PPKS yang mandiri” maka ada beberapa hambatan yang dihadapi sejalan berjalannya waktu yaitu :

indikator Kinerja “Persentase PPKS yang mandiri” yaitu

1. Kurangnya SDM fungsional Pekerja Sosial
2. Belum Terisinya Peta Jabatan masih banyak yang kosong
3. Belum optimalnya kerjasama dengan lintas sector terkait dalam penanganan PPKS
4. Kurangnya keterampilan SDM dalam penanganan PPKS
5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penangan PPKS seperti Bangunan Rumah singgah yang tidak memadai, Fasilitas Rumah singgah yang terbatas, Gudang Logistik Bencana belum ada, kendaraan operasional layanan kedaruratan yang belum ada.

2. Langkah-langkah Antisipasi yang di ambil

Guna meningkatkan capaian indikator Kinerja “Persentase PPKS yang mandiri” maka diperlukan langkah-langkah antisipasi yang harus di ambil yaitu :

1. Mengusulkan permintaan tenaga pekerja sosial kepada BPKSDM dalam memenuhi tenaga pekerja sosial
2. Mengusulkan pengisian peta jabatan kepada BPKSDM dalam memenuhi struktur peta jabatan
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan PPKS di Kabupaten Tanah Laut pada Lintas Sektor terkait (dalam bentuk TIM,Perbub,MOU)
4. Mengusulkan penambahan anggaran terkait dengan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan penanganan PPKS serta mengusulkan ke Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarbaru.
5. Mengusulkan Alokasi Anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana Rumah Singgah, gudang logistik dan kendaraan operasional pelayanan kedaruratan.

II. Indikator “Nilai SAKIP Dinas Sosial”

Tabel. 3.11

Perbandingan Realisasi Dan Target Indikator Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	BB (75)	BB(73,95)	98,6%

Indikator Kinerja Kepala Dinas Sosial “Nilai SAKIP Dinas Sosial” pada tahun 2024 terealisasi dengan Nilai BB (73,95) dari target yang ditetapkan dengan Nilai BB (75) dengan persentase capaian sebesar 98,6%. Indikator Kinerja ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu dengan

realisasi Nilai CC (51). Untuk memperoleh Hasil Penilaian Kinerja tersebut maka Dinas Sosial telah dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut terhadap indikator-indikator yaitu :

1. Indeks Repormasi Birokrasi hasil validasi Inspektorat Kabupaten;
2. Nilai SAKIP hasil validasi Inspektorat Kabupaten;
3. Persentase Capaian IKU hasil validasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Inovasi perangkat Daerah hasil Validasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
5. Persentase Realisasi Fisik Perangkat Daerah hasil validasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Persentase Realisasi keuangan Perangkat Daerah Hasil validasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Persentase Realisasi pendapatan hasil validasi Badan Pendapatan Daerah

Hal ini dikarenakan dinas sosial telah berusaha dengan optimal untuk memenuhi beberapa data masing-masing indikator sesuai dengan hasil reuiu Inspektorat yaitu :

- a. Indeks reformasi Birokrasi yang diperoleh dinas sosial dengan skor sebesar 30 dari yang diharapkan 30 atau dengan indeks reformasi birokrasi sebesar 100%
- b. Nilai SAKIP yang diperoleh dinas sosial dengan skor sebesar 15 dari yang diharapkan sebesar 25 atau dengan nilai SAKIP sebesar 73,95%
- c. Persentase capaian IKU yang di peroleh dinas sosial dengan skor sebesar 20 dari yang diharapkan 20 atau dengan Persentase Capaian IKU sebesar 98,91%
- d. Inovasi Perangkat Daerah yang diperoleh dinas sosial dengan skor sebesar 3 dari yang diharapkan 15 atau dengan Jumlah Inovasi sebanyak 1
- e. Persentase Realisasi Fisik, Keuangan dan Pendapatan Perangkat Daerah diperoleh score 8 dari yang diharapkan 10 atau persentase Realisasi Fisik, Keuangan, dan Pendapatan sebesar 86,38%

1. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Indikator Kinerja Kepala Dinas Sosial “ Nilai SAKIP Dinas Sosial” pada tahun 2024 terealisasi dengan Nilai BB (76) dari target yang ditetapkan dengan Nilai BB (75) dengan persentase capaian sebesar 101,33%. Indikator Kinerja ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu dengan realisasi Nilai CC (51). Hal ini dikarenakan dinas sosial telah berusaha dengan optimal untuk memenuhi beberapa data masing-masing indikator sesuai dengan hasil reviu Inspektorat yaitu :

- a. Indeks reformasi Birokrasi yang diperoleh dinas sosial dengan skor sebesar 30 dari yang diharapkan 30 atau dengan indeks reformasi birokrasi sebesar 100%
- b. Nilai SAKIP yang diperoleh dinas sosial dengan skor sebesar 15 dari yang diharapkan sebesar 25 atau dengan nilai SAKIP sebesar 73,95%
- c. Persentase capaian IKU yang diperoleh dinas sosial dengan skor sebesar 20 dari yang diharapkan 20 atau dengan Persentase Capaian IKU sebesar 98,91%
- d. Inovasi Perangkat Daerah yang di peroleh dinas sosial dengan skor sebesar 3 dari yang diharapkan 15 atau dengan Jumlah Inovasi sebanyak 1
- e. Persentase Realisasi Fisik, Keuangan dan Pendapatan Perangkat Daerah diperoleh score 8 dari yang diharapkan 10 atau persentase Realisasi Fisik, Keuangan, dan Pendapatan sebesar 86,38%

2. Analisa Hambatan

Untuk mencapai indikator Kinerja Kinerja “ Nilai SAKIP Dinas Sosial” maka ada beberapa hambatan yang dihadapi sejalan berjalannya waktu yaitu :

- 1 Seringkali terjadi perubahan indikator kinerja (terkait *cascading*) sebagai dampak dari perubahan yang dilakukan oleh Birokrasi selaku auditor.
- 2 Adanya perbedaan data sampel yang ditetapkan dari dinas sosial dengan bappeda untuk mengukur populasi

3. Langkah-langkah Antisipasi yang di ambil

Guna meningkatkan capaian indikator Kinerja “Nilai SAKIP Dinas Sosial” maka diperlukan langkah-langkah antisipasi yang harus diambil yaitu :

- 1 Di tahun 2024 dinas sosial telah mengikuti Desk dengan Menpan RB bersama Badan Perencanaan Daerah guna menetapkan Indikator Kinerja agar indikator kinerja tersebut dapat terukur dan dinas sosial melalui kasubbag perencanaan meningkatkan koordinasi kepada Badan Perencanaan daerah untuk memastikan indikator tersebut telah sesuai.
- 2 Dinas sosial akan menerapkan data satu pintu yang terverifikasi dan tervalidasi untuk menjamin kesesuaian data dan semua skpd terkait dapat mengambil data dari Dinas Sosial agar tidak terjadi perbedaan data di kemudian hari.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 di dukung dengan anggaran sebesar Rp12.681.349.495,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan puluh Lima Rupiah).

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut melaksanakan 6 Program 14 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Pada tabel berikut akan digambarkan tentang anggaran dan realisasi APBD Dinas Sosial Tahun 2024 :



BAB III
Akuntabilitas kinerja

Tabel 3.12

Laporan Realisasi Kegiatan dan Rencana Realisasi Kegiatan
Selasa, 31 Desember 2024

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran
					Pagu	%	Pagu
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.942.257	Rp 5.942.065	Rp 5.561.000	93,59	Rp 381.065
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4.999.811	Rp 5.952.021	Rp 5.763.900	96,84	Rp 188.121
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.281.144.053	Rp 4.281.144.053	Rp3.679.187.607	85,94	Rp 601.956.446

**BAB III****Akuntabilitas kinerja**

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 4.999.781	Rp 5.997.449	Rp 5.296.400	88,31	Rp 701.049
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.151.592	Rp 3.320.662	Rp 2.975.000	89,59	Rp 345.662
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 23.677.917	Rp 43.637.014,00	Rp 39.765.360	91,13	Rp 3.871.654
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 2.996.674	Rp 3.661.724,00	Rp 3.310.020	90,40	Rp 351.704
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Rp 3.892.707	Rp 13.724.608	Rp 13.068.500	95,22	Rp 656.108



BAB III
Akuntabilitas kinerja

		Penyediaan Bahan/Material	Rp 16.000.000	Rp 16.000.000	Rp 14.900.000	93,13	Rp 1.100.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp249.996.618	Rp349.946.618	Rp 349.380.945	99,84	Rp 565.673
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	Rp -
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp 2.000.000	100,00	Rp -
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp296.478.824	Rp161.478.824	Rp 99.107.279	61,37	Rp 62.371.545



BAB III
Akuntabilitas kinerja

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 802.843.968	Rp752.843.968	Rp 711.402.596	94,50	Rp41.441.372
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp30.000.000	Rp 35.000.000	Rp 34.866.000	99,62	Rp 134.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp200.000.000	Rp210.000.000	Rp209.973.466	99,99	Rp26.534



BAB III

Akuntabilitas kinerja

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 17.000.000	Rp 17.000.000	Rp16.850.000	99,12	Rp 150.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 49.824.000	Rp 49.824.000	Rp -	0	Rp 49.824.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 14.805.130	Rp 14.805.130	Rp -	0	Rp 14.805.130



BAB III

Akuntabilitas kinerja

2	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp3.993.081,00	Rp3.993.081,00	Rp3.993.000,00	100	Rp 81
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp38.904.412	Rp38.904.412	Rp36.040.100	92,64	Rp2.864.312
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp185.395.509	Rp185.395.509	Rp161.446.450	87,08	Rp 23.949.059



BAB III
Akuntabilitas kinerja

		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp248.780.201	Rp248.780.201	Rp229.993.800	92,45	Rp18.786.401
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Rp3.654.892.485	Rp3.654.892.485	Rp2.543.170.000	69,58	Rp1.111.722.485
		Alat Bantu	Rp 39.993.000	Rp 39.993.000	Rp 32.020.000	80,06	Rp 7.973.000



BAB III

Akuntabilitas kinerja

		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp49.989.171	Rp49.989.171	Rp 47.163.335	94,35	Rp 2.825.836
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp224.485.625	Rp 224.485.625	Rp 197.173.400	87,83	Rp 27.312.225
		Pemberian Layanan Rujukan	Rp5.000.000	Rp 7.000.000	Rp 3.890.000	55,57	Rp 3.110.000
4	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp 19.939.776	Rp19.939.776	Rp 14.655.000	73,50	Rp 5.284.776
		Rujukan Anak- Anak Terlantar	Rp 19.999.696	Rp 19.999.696	Rp 1.410.000	7,05	Rp 18.589.696
		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan PemeliharaanAnak Terlantar	Rp 29.999.868	Rp 29.999.868	Rp 26.245.000	87,48	Rp 3.754.868



BAB III
Akuntabilitas kinerja

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 249.925.328	Rp 249.925.328	Rp 248.820.000	99,56	Rp 1.105.328
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Rp 374.962.745	Rp 424.962.745	Rp 403.801.000	95,02	Rp 21.161.745
		Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 63.955.022	Rp 77.301.551	Rp 70.060.320	90,63	Rp 7.241.231
		Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp 109.972.065	Rp 124.952.065	Rp 116.859.950	93,52	Rp 8.092.115
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Rp 1.377.028.266	Rp 983.548.801	Rp 861.866.470	87,63	Rp 121.682.331



BAB III
Akuntabilitas kinerja

		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp44.153.534	Rp 72.569.534	Rp 71.516.000	98,55	Rp 1.053.534
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp 79.611.759	Rp 79.611.759	Rp 74.482.700	93,56	Rp 5.129.059
6	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 72.745.641	Rp 72.745.641	Rp 70.933.786	97,51	Rp 1.811.855



BAB III

Akuntabilitas kinerja

		Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 100.081.111	Rp 100.081.111	Rp 70.702.800	70,65	Rp 29.378.311
			Rp13.001.561.627	Rp12.681.349.495	Rp10.479.651.184	82,64	Rp2.201.698.311,00



**BAB III****Akuntabilitas kinerja****Tabel 3.13****Data Perbandingan Realisasi anggaran Tahun 2023 terhadap Tahun 2024**

Uraian	2023		%
	Anggaran	Realisasi	
BELANJA OPERASI	13.217.317.089,-	9.655.124.868,-	72,90
Belanja Pegawai	4.166.000.260,-	3.365.538.103,-	80,79
Belanja Barang dan Jasa	4.218.119.547,-	2.577.251.055,-	61,10
Belanja Bantuan Sosial	4.422.690.000,-	3.393.720.000,-	76,73
BELANJA MODAL	410.507.282,-	318.615.710,-	77,62
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.507.282,-	252.780.210,-	95,21
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.000.000,-	49.900.000,-	39,92
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0
J u m l a h	13.217.317.089,-	9.655.124.868,-	73,05

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN N 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	12.681.349.495	10.479.651.184	82,64	9.655.124.868
5.1	BELANJA OPERASI	12.027.175.320	9.873.232.148	82,09	9.336.509.158
5.1.01	Belanja Pegawai	4.281.144.053	3.679.187.607	85,94	3.365.538.103
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.988.858.267	3.564.604.541	89,36	2.577.251.055
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.757.173.000	2.629.440.000	69,98	3.393.720.000
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12.027.175.320	9.873.232.148	82,09	9.336.509.158
5.2	BELANJA MODAL	664.174.175	606.419.036	92,70	318.615.710
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	531.428.534	499.085.250	93,91	252.780.210
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.745.641	70.933.786	97,51	49.900.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0	15.935.500
5.2.06	Belanja Modal Aset	50.000.000	36.400.000	72,80	0

	Lainnya				
	JUMLAH BELANJA MODAL	664.174.175	606.419.036	92,70	318.615.710
	JUMLAH BELANJA	12.681.349.495	10.479.651.184	82,64	9.655.124.868
	SURPLUS/DEFISIT	(12.681.349.495)	(10.479.651.184)	82,64	(9.655.124.868)

Pada tahun 2023 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.**13.217.317.089,-** (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Tiga Ratus Tujuh Belas Delapan Puluh Sembilan Rupiah) mampu terealisasi sebesar Rp.**9.655.124.868,-** (Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Seratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar **73,05%**, sedangkan tahun 2024 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.12.681.349.495 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) mampu terealisasi sebesar Rp. 10.479.651.184,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 82,64% jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan, yang terdiri atas 6 (enam) program yang terdiri atas 14 (empat belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan.

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Telah disampaikan sebelumnya bahwa pada tahun 2024 Dinas Sosial mengampu 6 Program sebagai alat untuk mencapai sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Sasaran Strategis Dinas Sosial meliputi 13 Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)



BAB III

Akuntabilitas kinerja

2. Meningkatnya kemandirian PPKS penerima UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
 3. Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 4. Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
 5. Meningkatnya koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan
 6. Meningkatnya Pengeloaan Data Terpadu PPKS dan Kemiskinan
 7. Meningkatnya PPKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial
 8. Meningkatnya kemampuan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
 9. Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa
 10. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD
 11. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD
 12. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD
 13. Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah
- Sedangkan 6 program tersebut meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- **Sasaran 1 (Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS)**

Untuk mendukung sasaran diatas didukung dengan 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.15

Realisasi Anggaran Pada Sasaran 1

No.	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	38.904.412	36.040.100	92,64
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	185.395.509	161.446.450	87,08



BAB III
Akuntabilitas kinerja

				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	248.780.201	29.993.800	92,45

		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	3.654.892.485	2.543.170.000	69,58
				Alat Bantu	39.993.000	32.020.000	80,06
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	49.989.171	47.163.335	94,35
				Pemberian Layanan Kedaruratan	224.485.625	197.173.400	87,83
				Pemberian Layanan Rujukan	7.000.000	3.890.000	55,57



BAB III
Akuntabilitas kinerja

		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	19.939.776	14.655.000	73,50
				Rujukan Anak- Anak Terlantar	19.999.696	1.410.000	7,05
				Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	29.999.868	26.245.000	87,48
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	249.925.328	248.820.000	99,56
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/ Kota	424.962.745	403.801.000	95,02



BAB III
Akuntabilitas kinerja

				Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	77.301.551	70.060.320	90,63
				Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	124.952.065	116.859.950	93,52
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	983.548.801	861.866.470	87,63
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	72.569.534	71.516.000	98,55



BAB III
Akuntabilitas kinerja

			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	79.611.759	74.482.700	93,56
					6.532.251.526	5.140.613.525	78,70



Sedangkan capaian kinerja pada indikator kinerja utama pada sasaran 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PPKS yang mandiri	5%	6,23%	124,60%

Dari 2 tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan capaian kinerja sebesar 124,60% realisasi keuangan mampu terserap sebesar 78,90% ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 45,70% yang secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PPKS yang mandiri	78,90%	124,60%	45,70%

- Sasaran 2 (Nilai SAKIP Dinas Sosial)

Untuk mendukung sasaran diatas didukung dengan 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.18

Realisasi Anggaran Pada Sasaran 2

No.	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Nilai SAKIP Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.942.065	5.561.000	93,59
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.952.021	5.763.900	96,84
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.281.144.053	3.679.187.607	85,94



BAB III
Akuntabilitas kinerja

				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.997.449	5.296.400	88,31
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.320.662	2.975.000	89,59
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.637.014	39.765.360	91,13
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.661.724	3.310.020	90,40
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	13.724.608	13.068.500	95,22



BAB III
Akuntabilitas kinerja

				Penyediaan Bahan/Material	16.000.000	14.900.000	93,13
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349.946.618	349.380.945	99,84
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.478.824	99.107.279	61,37



BAB III
Akuntabilitas kinerja

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	752.843.968	711.402.596	94,50
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	34.866.000	99,62
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.000.000	209.973.466	99,99
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	17.000.000	16.850.000	99,12



BAB III
Akuntabilitas kinerja

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.824.000	-	0,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.805.130	-	0,00
					5.972.278.136	5.193.408.073	86,96

Sedangkan capaian kinerja pada indikator kinerja utama pada sasaran 2 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel. 3.19
Perbandingan Realisasi Dan Target Indikator Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	BB (75)	BB(73,95)	98,6%

Dari 2 tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan capaian kinerja sebesar 98,6% sedangkan realisasi keuangan mampu terserap sebesar 86,96% ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 11,64% yang secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.20
Perbandingan Realisasi Dan Target Indikator Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Efisiensi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	86,96%	98,6%	11,64%

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan 2023

Tidak ada perubahan Program pada tahun 2024 dan 2023 dengan total 6 Program akan tetapi ada penambahan Kegiatan pada tahun 2024 dengan total 14 Kegiatan (Rutin dan Non Rutin). Berikut tabel perbandingan Program dan Kegiatan tahun 2024 dan 2023

Tabel 3.2

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

TAHUN 2023			TAHUN 2024	
No.	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

3	PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota



BAB III

Akuntabilitas kinerja

BAB IV

PENUTUP

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan dibidang sosial pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Memperhatikan uraian dari beberapa data yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan bahwa semua target sasaran yang telah ditetapkan ada yang dapat tercapai dan ada yang belum tercapai. Untuk Sasaran strategis yang diemban oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, “Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS” pada tahun 2024 dengan indikator Kinerja “Persentase PPKS yang mandiri” ditargetkan sebesar 17,5% dari populasi PPKS di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 sebanyak 32.911, sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi sebanyak 17,06% dengan capaian kinerja lebih dari 97,47%. Capaian indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 6 Program dan 14 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp.12.681.349.495,- (Dua Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). Pada tahun 2024, capaian indikator “Persentase PPKS yang Mandiri” mengalami penurunan sebesar 12,31% dibandingkan tahun 2023. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 17,06% dari jumlah populasi, dengan target yang ditetapkan sebesar 17,5%. Sementara itu, pada tahun 2023 realisasi mencapai 29,37% dengan target sebesar 30%. Meskipun terdapat penurunan persentase secara tahunan, hal ini tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja Dinas Sosial secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pencapaian target tahun 2024 yang mencapai 97,47%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan. Penurunan capaian tersebut lebih disebabkan oleh kondisi eksternal, khususnya menurunnya intensitas kejadian bencana alam pada tahun 2024. Dengan lebih sedikitnya bencana, jumlah

PPKS yang membutuhkan pendampingan pun menurun, sehingga berdampak pada total populasi yang dimandiri melalui program-program intervensi sosial. Oleh karena itu, penurunan ini justru menggambarkan situasi sosial yang lebih kondusif dan stabil di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka terjadi peningkatan dari sasaran dan indikator yang dirumuskan dinas sosial, hal ini dikarenakan telah optimalnya penanganan PPKS melalui optimalisasi layanan dengan Inovasi layanan seperti JOKJES (Pojok Kesejahteraan Sosial) di LKK Posyandu Kelurahan Pabahanan dan Rumah Singgah “AYANGJUKI” serta keterlibatan penanganan PPKS seperti Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti TKSK, PSM, Karang Taruna, Puskesmas, TAGANA, Pelopor Perdamaian dan juga lintas sektor terkait seperti BAZNAS, Dinas Kesehatan, POLRES, BPBD, UPT PPA, Disnakertrans, Pengadilan Negera dan Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan dan lain-lain. Dinas sosial secara aktif mendorong peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk dapat semakin aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta melibatkan lintas sector dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kapasitas PSKS pun terus dilakukan pembinaan dan pemberdayaan melalui bimbingan teknis (Bintek) dan pelatihan-pelatihan lainnya.

Indikator Kinerja Kepala Dinas Sosial “Nilai SAKIP Dinas Sosial” pada tahun 2024 terealisasi dengan Nilai BB (76) dari target yang ditetapkan dengan Nilai BB (75) dengan persentase capaian sebesar 101,33%. Indikator Kinerja ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu dengan realisasi Nilai CC (51). Dari Pelaksanaan Program/Kegiatan pada tahun 2023 terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain :

- a. Kurangnya SDM fungsional Pekerja Sosial;
- b. Belum Terisinya Peta Jabatan masih banyak yang kosong;
- c. Belum optimalnya kerjasama dengan lintas sector terkait dalam penanganan PPKS;
- d. Kurangnya keterampilan SDM dalam penanganan PPKS;
- e. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penangan PPKS seperti

Bangunan Rumah singgah yang tidak memadai, Fasilitas Rumah singgah yang terbatas, Gudang Logistik Bencana belum ada, kendaraan operasional layanan kedaruratan yang belum ada;

- f. Seringkali terjadi perubahan indikator kinerja (terkait *cascading*) sebagai dampak dari perubahan yang dilakukan oleh Birokrasi selaku auditor;
- g. Adanya perbedaan data sampel yang ditetapkan dari dinas sosial dengan bappeda untuk mengukur populasi;

Adapun upaya yang ditempuh untuk penyelesaian permasalahan tersebut, yaitu :

- a. Mengusulkan permintaan tenaga pekerja sosial kepada BPKSDM dalam memenuhi tenaga pekerja sosial;
- b. Mengusulkan pengisian peta jabatan kepada BPKSDM dalam memenuhi struktur peta jabatan;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan PPKS di Kabupaten Tanah Laut pada Lintas Sektor terkait (dalam bentuk TIM, Perbub, MOU);
- d. Mengusulkan penambahan anggaran terkait dengan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan penanganan PPKS serta mengusulkan ke Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarbaru;
- e. Mengusulkan Alokasi Anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana Rumah Singgah, gudang logistik dan kendaraan operasional pelayanan kedaruratan;
- f. Di tahun 2024 dinas sosial telah mengikuti Desk dengan Menpan RB bersama Badan Perencanaan Daerah guna menetapkan Indikator Kinerja agar indikator kinerja tersebut dapat terukur dan dinas sosial melalui kasubbag perencanaan meningkatkan koordinasi kepada Badan Perencanaan daerah untuk memastikan indikator tersebut telah sesuai;
- g. Dinas sosial akan menerapkan data satu pintu yang terverifikasi dan tervalidasi untuk menjamin kesesuaian data dan semua skpd terkait dapat mengambil data dari Dinas Sosial agar tidak terjadi perbedaan data di kemudian hari;



BAB III

Akuntabilitas kinerja

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2024, diharapkan menjadi pedoman peningkatan capaian kinerja pada tahun akan datang.

